

EVALUASI KTSP BERBASIS KINERJA

Rino

Abstrak: Evaluasi kurikulum merupakan tahapan penting dalam pengembangan kurikulum untuk mengetahui pencapaian target yang mana dikhususkan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Evaluasi KTSP berbasis kinerja adalah model evaluasi yang melihat penampilan/performan dari elemen sekolah, yaitu bahwa model evaluasi kurikulum berbasis kinerja merupakan konsekuensi logis dari manajemen berbasis sekolah (MBS).

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja

A. Pendahuluan

Tingkat pengangguran di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan dalam empat tahun terakhir ini, pada Agustus 2004 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,9 persen dan meningkat menjadi 10,3 persen pada Februari 2005, pada Oktober 2005 tingkat pengangguran membengkak menjadi 10,84 persen atau

terdapat sekitar 11,6 juta orang pengangguran terbuka. Jika jumlah ini ditambahkan dengan orang setengah menganggur dan pengangguran terselubung maka terdapat sekitar 40 juta lebih orang dalam kategori pengangguran dan bila diakumulasikan lagi dengan jumlah penduduk miskin angkanya bertambah besar. Pada tahun 2004 BPS mencatat jumlah penduduk

miskin 36,1 juta orang yang mengalami penurunan pada tahun sebelumnya 37,3 juta orang.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran memiliki korelasi dengan masalah pendidikan karena pendidikan adalah sarana menuju kehidupan yang lebih baik, bangsa yang maju pendidikannya kualitas manusianya juga baik maka masalah kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi. Prof.Dr.Paulo Freire (Cruz dan Pradipto, 2002:5) yang sangat masyhur sebagai filsafat pendidikan terkemuka menuangkan gagasannya dalam buku yang berjudul "*Educacau Como Practica da Liberdade*" yang diartikan pendidikan sebagai praktek pembebasan berarti secara langsung Freire mengatakan pendidikan dapat membebaskan suatu bangsa dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Cruz memberikan interpretasi bahwa

pendidikan dilakukan sebagai atau bahkan poros utama dari kegiatan pembaharuan peradaban dan perubahan kebudayaan. Pendidikan yang benar dan sejati bukanlah pemberian atau pengalihan pengetahuan (*transfer of knowledge*) saja tetapi juga pengalihan dan penanaman nilai (*transfer of value*) yang berguna untuk hidup kehidupan dan penghidupannya. Fromm (Cruz dan Pradipto ,2002:5) meyakini pendidikan sebagai sarana untuk memanusiakan manusia, negara kita juga menegaskan bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan panca-

sila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Semakin jelas bahwa pendidikan adalah modal pokok sekaligus syarat mutlak suatu bangsa menjadi bangsa yang maju dan berkualitas. Keinginan untuk menjadi maju dan besar tentunya harus diiringi dengan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan yang harus memprioritaskan pendidikan sebagai sektor unggulan (*prime sector*) dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan secara proporsional bidang yang lain.

Menurut studi Bank Dunia (1999) yang dikutip Santo (2002:132) terdapat tiga pilar yang mendukung sistem pendidikan yang ideal yakni, *pertama* akses, terdiri atas murid yang siap belajar, dukungan lingkungan pembelajaran, peluang pendidikan *kedua* kualitas, terdiri atas kurikulum yang relevan, dukungan kepada staf, proses

belajar mengajar yang baik *ketiga* pilar dukungan, terdiri atas pemerintah yang baik, sumber daya manusia yang memadai, evaluasi yang baik. Yang patut digarisbawahi kurikulum dan sumberdaya manusia adalah penggerak utama dalam sistem pendidikan, maka pengelolaan pendidikan sebagai sektor unggulan wajib memperhatikan sumberdaya manusia yang terlibat dalam keseluruhan proses pendidikan.

Kebijakan pemerintah mengelola pendidikan dengan melakukan pergantian dan perbaikan kurikulum per periode kekuasaan dipandang sebagai langkah yang baik. Semenjak tahun 1968 hingga sekarang telah terjadi empat kali pergantian model kurikulum nasional masing-masing pada tahun 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, kurikulum, 2006. Harapan yang dititipkan dengan pergantian kurikulum adalah

tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan amanat konstitusi, seharusnya pergantian kurikulum yang telah dilakukan telah membawa bangsa Indonesia menjadi besar dan mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain yang telah maju namun hasil yang diperoleh sangat mengecewakan dengan diterbitkannya laporan HDI 2006 tentang pencapaian prestasi dan kualitas SDM (*Human Development Index*) Indonesia sekarang berada di bawah Vietnam, atau nomor 4 terbawah (nomor 102 dari 106 negara). Hasil Survei PERC di 12 negara juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan terbawah, satu peringkat di bawah Vietnam. Hasil survey matematika di 38 negara Asia, Australia, dan Afrika oleh TIMSS-R, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat 34. Hasil ini adalah potret bangsa Indonesia dalam penilaian inter-nasional. Pencapaian ini bukanlah yang

diharapkan dalam pergantian kurikulum sehingga dalam pikiran kita akan muncul pertanyaan : (1) Apa yang salah dengan kurikulum kita? (2) Mengapa pergantian kurikulum tidak membawa pencapaian pe-ningkatan kualitas manusia Indonesia? (3) Apakah konsep pengembangan kurikulum tidak relevan dengan kebutuhan? (4) Haruskah pergantian kurikulum dilakukan setiap periode suksesi kepemimpinan nasional? (5) Kurikulum yang bagaimanakah yang sesuai dengan kebutuhan kita hari ini? (6) Apakah yang harus kita lakukan dengan kurikulum yang ada sekarang? (7) Sudahkan kita melakukan kajian dan evaluasi secara totalitas terhadap kurikulum yang dijalankan?. Barangkali pertanyaan tersebut hanya beberapa pertanyaan sederhana dan tidak mewakili dari keseluruhan kegelisahan masyarakat akan tetapi yang

dirasakan mungkin lebih dari yang dibayangkan. Kiranya kegelisahan masyarakat akan pendidikan kita untuk hari ini dan masa depan perlu disikapi secara bijak oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi *decision maker* yang mengelola pendidikan. Berangkat dari keprihatinan tersebut makalah ini mencoba menguraikan sekelumit konsep kurikulum dan difokuskan pada evaluasinya. Pentingnya evaluasi kurikulum dibicarakan adalah sebagai refleksi dari kegelisahan yang mengalir dalam diri penulis sebagai praktisi di lapangan.

B. Kajian Teori

1. Konsep Kurikulum

Dalam kamus *Webster* (1856) yang dikutip oleh Nasution (2006:1) istilah kurikulum berarti “ 1. a race course; a place for running; a chariot, 2. a course of study in a university”. Kurikulum

diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir, kurikulum juga berarti *chariot* semacam kereta pacu pada zaman dulu yang membawa seseorang dari start sampai finish. Kamus *webster* juga memberikan penjelasan bahwa kurikulum yang digunakan dalam pendidikan didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat, kurikulum juga berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Dalam pandangan Zais (1976:1) “curriculum ordinarily is used by specialist in the field in two ways: (1) to indicate, roughly, a plan for the education of learners, and (2) to identify a field of study. Curriculum as a plan for the education of learners is part of the subject matter of the curriculum

filed". Sejalan dengan Zais, Murray Print (1993:23) "curriculum is defined as all the planned learning opportunities offered to learner by the educational institution and the experiences learners encounter when that curriculum is implemented". Saylor dan Alexander dalam karyanya berjudul Curriculum Planning for Better Teaching and Learning (1956)" The curriculum is the sum total of school's effort to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school". Nasution (2006:9) mengidentifikasikan kurikulum dalam empat segi yakni kurikulum dapat dilihat sebagai produk, kurikulum dapat dipandang sebagai program, kurikulum dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa dan kurikulum sebagai pengalaman siswa.

Definisi yang dikemukakan oleh ahli di atas secara

substantif tidaklah bertentangan dan masing-masingnya memiliki *key word* dan penekanan pada aspek perencanaan. Perencanaan kurikulum disusun sesuai kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum yang disusun dengan perencanaan yang matang akan memberikan kemudahan dalam tahap implementasi. Apabila tahap perencanaan tidak dipersiapkan sebaik mungkin maka dikhawatirkan pembelajaran yang dilakukan akan menjauhi pencapaian tujuan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 juga disebutkan bahwa "kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar". Dalam rencana kurikulum sudah tergambar semua yang akan dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar serta model

peserta didik yang akan dibentuk

2. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi berisikan informasi yang menggambarkan secara keseluruhan kinerja dalam proses belajar mengajar. Menurut Murray Print (1993:187) "Evaluasi adalah sumber informasi bagi *stakeholder* pendidikan untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam proses belajar mengajar sekaligus menentukan kebijakan pendidikan maupun keputusan dalam pengembangan kurikulum pada periode selanjutnya". *Phil Delta Kappa National Study Committee on Evaluation* (Brady, 1992:236) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses menggambarkan, mendapatkan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk pertimbangan pengambilan keputusan.

Tujuan melakukan evaluasi bermacam-macam dan sangat tergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang melakukannya. Akan tetapi yang paling penting menurut Nasution (1999:88) setidaknya ada tiga tujuan melakukan evaluasi yaitu *pertama* mengetahui hingga menentukan manakah siswa yang mencapai kemajuan kearah tujuan yang telah ditentukan *kedua* menilai efektifitas kurikulum *ketiga* menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Sedangkan Murray Print (1993:215) menerangkan bahwa evaluasi kurikulum dipergunakan untuk kepentingan: *pertama* sebagai umpan balik bagi siswa *kedua* mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan *ketiga* sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan kurikulum *keempat* membantu siswa dalam mengambil keputusan *kelima* menjelaskan tujuan

yang ingin dicapai *keenam* membantu pihak lain dalam mengambil keputusan terkait dengan peserta didik selanjutnya Print menjelaskan bahwa evaluasi adalah tahap/proses yang terdiri atas pengukuran (*measurement*) yaitu kalimat yang dipakai untuk melihat pencapaian target dengan menggunakan terminologi kuantitatif (angka) dan penilaian (*assessment*) adalah juga termasuk dalam cakupan pengukuran dengan menambahkan interpretasi dan representasi atas data-data yang diperoleh dari pengukuran. Maka untuk membuat putusan akhir dari proses evaluasi maka harus mengumpulkan data dari interpretasi penilaian dan hasil pengukuran

Hamalik (1993:5) menjelaskan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi adalah menjadi umpan balik dan sangat berharga bagi pembangunan bangsa. Lebih

lanjut Hamalik menjelaskan evaluasi kurikulum dilakukan pada tujuh komponen yaitu *pertama* evaluasi mutu pendidikan yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap beberapa kriteria mutu meliputi mutu dalam kriteria intrinsik, kriteria proses pendidikan, tujuan-tujuan ekstrinsik institusi pendidikan, prinsip-prinsip sosial dan institusi pendidikan *kedua* evaluasi peninjauan dan kebutuhan serta kelayakan kurikulum yaitu keseluruhan secara sistematis untuk menilai semua bentuk kebutuhan *ketiga* evaluasi program pendidikan yaitu keseluruhan kegiatan evaluasi yang dilakukan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dampak, efisiensi, dan keefektifan dengan menggunakan instrumen dan kriteria tertentu yang memberikan informasi bagi kepentingan program pendidikan selanjutnya *keempat* evaluasi pengembangan kurikulum yaitu

penilaian terhadap berbagai tahap pengembangan kurikulum yang dilakukan pada berbagai jenjang pendidikan *kelima* evaluasi proses belajar mengajar yaitu penilaian yang dilakukan terhadap proses belajar mengajar meliputi metode/strategi yang digunakan, media yang digunakan serta referensi yang dipakai *keenam* evaluasi isi/bahan ajar yaitu penilaian isi/materi/bahan ajar yang meliputi aspek filsafat dan tujuan diklat, ruang lingkup bahan pengajaran, kebenaran autensitas dan kenyataan, derajat keberartian bahan, edukatif dan metodologis, penggunaan bahasa yang baik dan benar sederhana dan jelas, *ketujuh* evaluasi pengembangan produk kurikulum yaitu evaluasi terhadap produk-produk pendidikan. Murray Print secara sederhana hanya membagi evaluasi pada dua hal *pertama* evaluasi produk yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap siswa atas

pencapaian dalam aktifitas belajar *kedua* evaluasi proses yaitu evaluasi terhadap pengalaman dan aktifitas yang terlibat dalam situasi pembelajaran diperoleh siswa.

Ahli-ahli di atas sangat menekankan akan pentingnya evaluasi dilakukan dalam pengembangan kurikulum sebagai proses yang harus dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Evaluasi adalah proses yang tidak sederhana dan tidak sulit sekiranya perangkat-perangkat evaluasi yang dibutuhkan telah dipersiapkan sedini mungkin. Hal yang paling penting dipersiapkan dalam melakukan evaluasi adalah indikator evaluasi yang harus jelas dan kelengkapan data yang akan dipergunakan dalam evaluasi. Sekiranya dua hal ini disediakan dengan baik dan lengkap maka evaluasi akan menjai proses yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Nasution (1999:89) memberikan arahan

agar sekiranya evaluasi dilakukan berdasar-kan *pertama* determinan kurikulum yaitu orientasi filosofis, konteks sosial ekonomi, hakekat pelajar, hakekat bahan pengajaran *kedua* harapan-harapan golongan klien dan konsumen *ketiga* bukti mengenai tingkat produktifitas dengan mempertimbangkan hasil belajar, biaya dan waktu.

3. Evaluasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP sebagai kurikulum yang diimplementasikan sejak tahun 2006 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya sebagai bentuk antisipasi dan adaptasi perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam skala nasional dan global. Menurut Mulyasa (2006:8) :

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan masing-

masing satuan pendidikan dengan mem-perhatikan dan ber-dasarkan standar kom-petensi dan kompetensi dasar yang dikembang-kan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang memiliki karak-teristik khusus dari kurikulum sebelumnya dengan memberikan ke-sempatan luas pada setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan potensi sekolah/daerah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat dan potensi serta karakteristik peserta didik.

Terlihat keinginan besar pemerintah memajukan pendidikan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan kurikulum yang berorientasi kompetensi dengan pola pikir global akan tetapi bertindak lokal (*think globally act locally*). Kebijakan KTSP dapat juga

dipandang sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Sidi (2001) menjelaskan bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang secara tegas dinyatakan dalam PP No 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian ke-wenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemerintah pusat hanya mengatur mengenai penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar, penetapan materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam efektif sedangkan pemerintah propinsi kewenangan terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu dan penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul

pendidikan bagi siswa. Selanjutnya semua urusan pendidikan diluar kewenangan pemerintah pusat dan propinsi sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II yang berarti tugas dan beban PEMDA Tingkat II dalam menangani layanan pendidikan amat besar dan berat terutama bagi daerah yang *capacity building* dan sumberdaya pendidikannya kurang oleh karena itu otonomi daerah bidang pendidikan bukan hanya ditujukan bagi daerah tingkat II tetapi juga dibebankan bagi sekolah sebagai penyelenggara pendidikan terdepan dan dikontrol oleh *stakeholders* pendidikan (orang tua, tokoh masyarakat, dunia usaha dan industri, DPR dan LSM pendidikan).

Kerangka otonomi daerah dan desentralisasi yang menjadi roh dalam KTSP menimbulkan keambiguan.

Apabila kita perhatikan dengan seksama kutipan PP No 25 tahun 2000 tentang otonomi daerah bidang pendidikan yang mengatur pembagian tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Propinsi dan kabupaten), satuan pendidikan dan Pemerintah terlihat tidak adanya muatan desentralisasi daerah secara luas dan menyeluruh bahkan secara nyata terlihat ketidakkonsistenan kebijakan otonomisasi pendidikan. Merujuk pendapat Slamet (2005:3)

Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik pemerataan, kualitas, relevansi dan efisiensi mengurangi beban pemerintah pusat yang berlebihan, mengurangi kemacetan-kemacetan jalur komunikasi meningkatkan kemandirian, demokrasi, daya tanggap,

akuntabilitas, kreatifitas, inovasi, prakarsa dan meningkatkan pemberdayaan dalam pengelolaan dan kepemimpinan pendidikan.

Maka sangat wajar sekali begitu banyak ketidakpuasan dan kritikan disampaikan terkait dengan KTSP sebagai kurikulum yang berlaku saat ini, baik oleh guru, kepala sekolah, tokoh masyarakat maupun dunia perguruan tinggi. Kritikan ini dalam alam demokrasi haruslah dipandang sebagai ciri negara berdemokrasi dengan harapan akan membawa perubahan dan kebaikan secara bersama. Beberapa catatan penting yang perlu kita renungkan terkait dengan KTSP adalah *pertama*, pembaharuan kurikulum tidak hanya terletak pada tataran metode, isi, orientasi menyikapi keadaan dan perubahan akan tetapi juga perlu memikirkan kesiapan seluruh unsur-unsur pendukung kebijakan kuri-

kulum serta elemen penting lainnya sehingga kurikulum yang akan diterapkan bisa dilaksanakan dengan matang; *kedua*, perlu dipikir ulang kembali tentang pelaksanaan kurikulum yang hanya diutamakan bagi daerah yang mampu dan memiliki kesiapan untuk menjalankan sementara daerah lain yang tidak mampu dapat menggunakan model yang dikembangkan BNSP artinya daerah tidak siap secara nasional menerima kebijakan ini maka seharusnya kebijakan tidak dipaksakan untuk tetap dijalankan sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antar daerah dan sekolah; *ketiga*, kebijakan Ujian Nasional sebagai evaluasi yang diatur secara nasional sangat kontradiktif dengan roh KTSP sebagai konsep desentralisasi dan otonomi daerah; *keempat*, KTSP berpeluang menimbulkan semangat *chauvinisme* dan kedaerahan yang fanatik

dengan konsep pengembangan potensi daerah.

Sebagai perbandingan kebijakan pendidikan Amerika Serikat adalah konsep desentralisasi yang sesuai dengan bentuk negara serikat yang dijalankannya *pertama* kebijakan pendidikan di Amerika Serikat adalah tanggung jawab distrik dan negara bagian *kedua* tujuan pendidikan adalah mencapai kesatuan dalam keragaman, mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi, membantu pengembangan individu, memperbaiki kondisi sosial masyarakat, mempercepat kemajuan nasional *ketiga* manajemen pendidikan adalah desentralisasi berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat negara bagian dan distrik sementara daerah federal hanya berperan sebagai pengawas *keempat* pendanaan berasal dari pemerintah federal untuk pendidikan dasar dan menengah dan juga dari

anggaran negara bagian dan distrik (Albab,2005).

KTSP yang sudah dijalankan selama dua tahun kebelakang belumlah memperlihatkan hasil yang mengembirakan keinginan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari kurikulum sebelumnya seperti menggantang angin ironisnya muncul masalah baru yang bukan menjadi bagian solusi namun bagian persoalan yang memperumit keadaan. Kebijakan Ujian Nasional menjadi momok tersendiri bagi sekolah sekaligus pemerintah daerah sehingga kerap melakukan tindakan yang destruktif untuk mengupayakan ke-berhasilan siswa dalam ujian nasional. Berbagai persoalan dan kritikan yang terhadap implementasi KTSP menuntut dilakukannya sebuah evaluasi sehingga akan dijadikan pedoman dalam pengembangan KTSP dimasa mendatang

4. Model Evaluasi KTSP Berbasis Kinerja

Kinerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, k-ampuan kerja. Istilah kinerja sangat familiar dalam lingkungan bisnis karena intensitas persaingan bisnis dimasa kini dan masa depan semakin ketat dan komplek ditandai dengan perkembangan dan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan jarak dan waktu antara satu daerah/negara dengan negara lain semakin dekat. Bisnis mengalami pergerakan yang sangat cepat dari sisi *product cycle* sehingga pemenang akan sangat ditentukan oleh seberapa cepat peluang peluang yang ada diambil dan dikelola menjadi keunggulan. Yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis hari ini adalah mereka yang memiliki

jiwa *enterpreneurship* yang mampu membaca dan menangkap peluang sekecil apapun. Kecepatan perputaran produk ini menuntut perusahaan melakukan langkah-langkah besar dan strategi-strategi yang jitu dan semuanya hanya akan terlaksana dengan dukungan SDM yang tangguh dan manajemen yang handal dalam mengelola perusahaan. Sekolah sebagai institusi jasa agaknya mulai diarahkan pada paradigma bisnis dengan pelaksanaan konsep *School Based Management (SBC)*. Manajemen Berbasis Sekolah menurut Sidi (2001)

adalah konsepsi dasar manajemen pendidikan masa kini yang memberikan kewenangan dan kepercayaan yang luas kepada sekolah berdasarkan prinsip profesionalisme untuk menata sekolah, mencari, mengembangkan dan mendayagunakan resource pendidikan yang tersedia

dan memperbaiki kinerja sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah yang bersangkutan.

Penekanan konsep Manajemen Berbasis Sekolah adalah peningkatan kinerja sekolah terutama untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan konsep ini maka penilaian manajemen berbasis kinerja adalah penilaian yang paling tepat digunakan sekolah dalam mengukur kinerja. Paradigma bisnis yang ditranferkan ke sekolah tidak serta merta menjadikan sekolah tempat yang eksklusif dan sulit dijamah oleh berbagai lapisan masyarakat akan tetapi paradigma bisnis ini diadosikan pada tataran manajemen (pengelolaan) yang profesional.

Penilaian Kinerja

Menurut Atkinson (1995:51) sistem penilaian kinerja sebaiknya mengandung in-

dikator kinerja yaitu *pertama*, memperhatikan setiap aktivitas organisasi dan menekankan pada perspektif pelanggan; *kedua*, menilai setiap aktivitas dengan menggunakan alat ukur kinerja yang mengesahkan pelanggan; *ketiga*, memperhatikan semua aspek aktivitas kinerja secara komprehensif yang mempengaruhi pelanggan; *keempat*, menyediakan informasi berupa umpan balik untuk membantu anggota organisasi mengenai permasalahan dan peluang untuk melakukan perbaikan. Menurut Hansen dan Mowen (1997: 396) penilaian kinerja perusahaan adalah:

“Activity performance measures exist both financial and non financial forms. These measures are designed to assess how well an activity was performed and the result achieved. They are also designed to reveal if constant improvement is

being realized. Measures of activity performance centre on three major dimension: (1) efficiency, (2) quality, and (3) time.”

Tujuan Penilaian Kinerja

Tujuan pokok penilaian kinerja adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk evaluasi dan pengembangan. Penilaian kinerja sebagai basis evaluasi digunakan untuk menilai kinerja masa lalu sebagai dasar pelaksanaan keputusan-keputusan personalia. Manajemen melakukan evaluasi kinerja dengan tujuan *pertama* memberikan masukan untuk keputusan sumber daya manusia seperti promosi, transfer dan pemutusan hubungan kerja *kedua* memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai bagaimana pandangan organisasi akan

kinerja mereka *ketiga* sebagai dasar dalam pemberian kompensasi yang mencakup peningkatan balas jasa, bonus karyawan dan kenaikan-kenaikan lainnya dalam gaji *ketiga*.

Simamora (1995) menjelaskan evaluasi kinerja membantu kebutuhan-kebutuhan organisasi dan karyawan dengan cara *pertama* memberikan para karyawan kesempatan untuk mengindikasikan arah dan tingkat ambisi mereka *kedua* memberikan para manajer kesempatan untuk mengindikasikan minat dalam mengembangkan karyawan *ketiga* mengidentifikasi bidang-bidang dimana pelatihan khusus dibutuhkan atau diinginkan dan tersedia *keempat* menyediakan dorongan bagi karyawan yang telah mencoba untuk bekerja dengan baik *kelima* menyediakan sarana untuk menyampaikan dan mendokumentasikan

ketidakpuasan terhadap kinerja karyawan yang tidak dapat diterima dan upaya-upaya untuk memperbaikinya.

Aspek pengembangan dari penilaian kinerja memotivasi dan mengarahkan kinerja individu dan upaya-upaya pengembangan karir. Aspek ini memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pengembangan dari anggota-anggota organisasi termasuk keahlian, pengalaman atau pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Penilaian kinerja untuk tujuan pengembangan juga mencakup pemberian pedoman kepada karyawan untuk kinerjanya di masa datang. Informasi dalam penilaian kinerja membantu mengenali kekuatan dan kelemahan dalam kinerja masa lalu dan menentukan arah apa yang harus diambil karyawan untuk memperbaikinya.

Aspek-aspek yang Dinilai dalam Penilaian Kinerja Manajemen

Kaplan dan Norton (1996:39) menggaris bawahi tentang perlunya pengukuran suatu bisnis dengan menggunakan *balanced scorecard*. Pengukuran keberhasilan kinerja perusahaan berdasarkan pendekatan *balanced scorecard* dibagi menjadi empat perspektif yaitu; perspektif keuangan (*financial perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*) perspektif internal (*internal perspective*), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning & growth Perspective*)

Stephen (1996) (Herawati: 2001) tiga perangkat kriteria yang harus dinilai manajemen adalah *pertama* hasil tugas individual dengan menggunakan hasil tugas individual seorang manajer dapat menilai atas dasar kriteria seperti kuantitas yang diproduksi, residu yang

dihasilkan dan biaya produksi perunit produksi *kedua* perilaku perilaku karyawan mencakup perilaku individu dan perilaku kelompok. *ketiga* ciri-ciri individu ini mempunyai korelasi yang paling jauh dengan kinerja aktual suatu pekerjaan, sehingga dikenal sebagai perangkat kriteria terlemah daripada hasil tugas individu maupun perilaku

Proses Penilaian Kinerja Manajemen

Sistem pengukuran kinerja yang efektif adalah sistem pengukuran yang dapat memudahkan manajemen untuk melaksanakan proses pengendalian dan memberikan motivasi kepada manajemen untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Ukuran kinerja yang baik mempunyai karakteristik (Horngren,1993) (Herawati:2001) *pertama* berhubungan dengan tujuan perusahaan *kedua* mempunyai perhatian yang

seimbang antara jangka pendek dan jangka panjang *ketiga* menggambarkan aktivitas kunci manajemen *keempat* dipengaruhi oleh tindakan karyawan *kelima* siap dipahami oleh karyawan *keenam* digunakan dalam evaluasi dan bermanfaat bagi karyawan *ketujuh* bertujuan logis dan merupakan pengukuran yang mudah *kedelapan* digunakan konsisten dan teratur.

Model Evaluasi KTSP Berbasis Kinerja

Paradigma pengelolaan sekolah yang sudah mulai diarahkan kepada pengelolaan bisnis dengan menggunakan konsepsi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sangat memungkinkan dilakukannya penilaian berbasis kinerja. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pun tidak menutup kemungkinan dilakukan hal yang sama sehingga model evaluasi kurikulum berbasis kinerja menjadi sebuah

tawaran menarik untuk didiskusikan dan menjadi wacana yang cukup hangat untuk diperdebatkan. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja pada KTSP adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan kinerja kurikulum yang berorientasi pada *stakeholder*, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk evaluasi dan pengembangan. Penilaian KTSP berbasis kinerja digunakan untuk menilai kinerja masa lalu sebagai dasar pelaksanaan keputusan-keputusan pada masa yang akan datang, evaluasi KTSP berbasis kinerja adalah evaluasi yang mengkhususkan penilaian pada aspek manajemen sekolah dalam mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolahnya. Unsur-unsur yang akan dievaluasi dalam model ini adalah sangat berhubungan dengan komponen-komponen penting di sekolah mulai dari

kepala sekolah, wakil, guru, administrasi dan tata usaha, siswa, dan komponen pendukung lainnya yang memiliki andil dalam sekolah baik dari internal maupun eksternal yang meliputi empat perspektif yaitu *pertama* perspektif keuangan meliputi *growth* (kemampuan sekolah dalam mencari sumber pembiayaan secara eksternal), *sustain* (bagaimana mempertahankan kepercayaan *stakeholder* terhadap sekolah, *harvest* (meningkatkan daya guna/nilai investasi yang sudah dimiliki sehingga dapat memaksimalkan arus kas di sekolah), *kedua* perspektif *stakeholder* yaitu berkaitan dengan kemampuan sekolah mempertahankan citra baiknya dimata *stakeholder* , *ketiga* perspektif proses internal yaitu terkait dengan upaya sekolah dalam menjalankan fungsi pokoknya meliputi tujuan, aktifitas belajar mengajar, materi/isi dan model evaluasi

yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan siswa, kreatifitas, *keempat* perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yaitu terkait dengan kemampuan dan kualifikasi akademik guru dan tenaga administrasi di sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, keempat perspektif itu akan bermuara pada hasil belajar siswa dalam bentuk Ujian Akhir Sekolah dan Ujian Nasional

C. Penutup

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah sebuah inovasi baru yang dihasilkan pemerintah, konsekwensi dari sebuah inovasi akan menimbulkan pendapat dan penilaian yang terpolarisasi kepada setuju atau tidak setuju, sejak diberlakukan dua tahun yang lalu hingga sekarang kurikulum ini belum memperlihatkan kinerja yang optimal memperbaiki mutu dan kualitas manusia Indonesia maka penilaian dan evaluasi terhadap KTSP

secara keseluruhan perlu dilakukan dengan harapan akan ditemukan berbagai kelemahan dan kekurangan yang akan dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan oleh pemerintah. Evaluasi KTSP berbasis kinerja adalah penilaian KTSP dengan memperhatikan pencapaian-pencapaian setiap elemen yang ada dalam memenuhi setiap target yang telah ditetapkan, model evaluasi ini perlu didiskusikan secara mendalam sehingga akan dapat dipergunakan sebagai salah satu alternatif model evaluasi KTSP.

Daftar Pustaka

- Atkinson, Anthony A, dkk. 1995. *Management Accounting*. Second Edition. Prentice Hill. Richard D Irwin, Inc. Phillipines
- Brady, Laurie. (1992). *Curriculum Development (Third Edition)*. Australia. Prentice Hall
- Cruz dan Pradipto. (2002). *Universitas: "Pabrik" SDM yang (Mestinya) Paling Qualified*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya
- Hamalik, Oemar. (1989). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Henry Simamora (1985). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1, BP-STIE YKPN, Yogyakarta
- Herawati (2001). "Balance Scorecard Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Manajemen". *Jurnal kajian Akuntansi dan Auditing Universitas Bung Hatta*.
- Kaplan, R. S. & Norton, D. P. 1996. "*The balanced scorecard: Translating strategy into action*", Boston, MA: Harvard Business School Press.

- Mulyasa, Enco. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. (2006). *Asas-asas Kurikulum*. Jakarta. Bumi Aksara
- (1999). *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta. Bumi Aksara
- Print, Murray. (1993). *Curriculum Development and Design*. Australia. Allen & Unwin
- Santo, Jhon De. (2002). *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Merajut Angan di Tengah Badai Perubahan Zaman*. Yogyakarta. Universitas Atma Jaya
- Saylor, J.G and W.M. Alexander. (1956) *Curriculum Planning*, New york. Rinehart Company
- Sidi, Indrajati. (2001). "Otonomi Daerah Bidang Pendidikan". *Jurnal Studi Pem-bangunan Kemasya-rakatan dan Lingkungan* Vol.3 No 1/2001
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Zais, Robert S. (1976). *Curriculum Principles and Foundation*. London. Harper and Row